Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, korupsi sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tentang tata kelola administrasi. Hal ini dapat dibuktikan karena kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali terjadi dari ranah kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Sehingga korupsi sering kali dihubungkan dengan politik, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial (*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2011, h.23).

Permasalahan korupsi sudah menjadi momok menakutkan bagi seluruh dunia, terutama dalam sistem pemerintahannya. Karena korupsi yang sering terjadi terdapat pada penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi (Klitgaard, Abaroa & Parris, 2000, h.1-2). Dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Korupsi*, Syed Hussein Alatas menjelaskan pejabat yang melakukan korupsi adalah mereka yang menerima pemberian yang disodorkan oleh orang yang mempunyai kepentingan agar mendapatkan perhatian istimewa (1981, h.11). Sementara menurut David M. Charles (dikutip dalam Lopa, 2001, h.67) istilah korupsi dapat dibagi menjadi berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016

Dalam sejarahnya, Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang tingkat korupsinya sudah terjadi lama sejak kependudukan Jepang. Pada saat Jepang berkuasa, mereka melakukan korupsi di mana-mana dikarenakan kelangkaan barang dan bahan makananan serta lemahnya pengawasan pemerintah (Alatas, 1981, h.120).

Akibatnya, korupsi yang telah melekat dengan Indonesia akhirnya mempengaruhi berbagai aspek kepentingan negara hingga saat ini, salah satunya politik. Menurut mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, politik masih menjadi bagian yang paling rawan terkena korupsi. Bahkan, potensi korupsi politik dapat menjadi lebih besar bila pilkada serentak pada tahun 2015 lalu dilakukan secara tidak langsung (dikutip dalam "KPK Prediksi Korupsi Politik Masih Tinggi", 2015, para.2).

Gambar 1.1 Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi

(Sumber: *KPK - Anti Corruption Clearing House*, 2016)

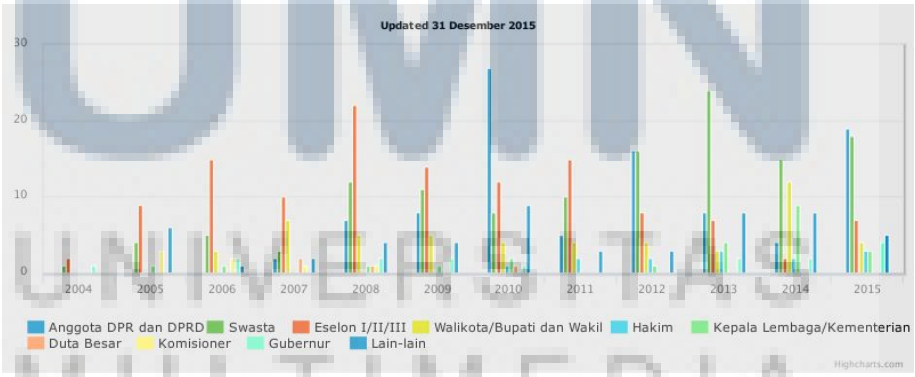

Gambar di atas menunjukkan per 31 Desember 2015, KPK telah menangkap pelaku korupsi yang terdiri dari Swasta sebanyak 18 orang; anggota DPRD/DPRD 19 orang; Gubernur 4 orang; Walikota/Bupati dan Wakilnya 4 orang; Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 3 orang; dan Eselon I, II, III

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016

sebanyak 7 orang. Bila dihitung dari tahun 2004, maka KPK sudah menangkap total 518 orang yang melakukan tindak pidana korupsi (ACCH, 2016, para.1).

Untuk menumpas kejahatan korupsi, Indonesia membangun KPK yang bersifat independen. Pembentukan KPK berdasarkan oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 untuk melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan (KPK, 2002, para.1).

Salah satu upaya KPK dalam memberantas korupsi adalah melalui *Anti Corruption Film Festival* atau ACFFest, yang dibentuk pada tahun 2013. ACFFest dijalankan oleh KPK dan *Management System International* (MSI) yang dijadikan sebuah ajang untuk berkreasi, melakukan eksibisi, dan berbincang dalam forum diskusi yang digagas. Program ini sendiri didukung oleh *United States Agency International Development* (USAID) (ACFFest, 2015, para.1).

Film-film lokal yang bertemakan anti korupsi sendiri diharapkan mampu dalam memberikan peran sebagai *media control* terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan film, masyarakat terutama generasi muda diharapkan untuk semakin peka dan tidak bersikap primitif terhadap praktik korupsi mulai dari lingkungan sekitarnya (KPK, 2015, para.1).

Adnan Pandu Pradja yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada tahun 2014 menjabarkan, pendekatan melalui film lebih efektif untuk memberi pesan dan pemahaman akan pentingnya pemberantasan korupsi bagi masyarakat. Hal serupa juga diyakini oleh Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK lainnya di periode yang sama. Menurutnya, film merupakan bagian dari terobosan dan evaluasi KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016

nurani masyarakat yang mudah tersentuh bila diperlihatkan makna atau *value* dari film yang menggambarkan banyak segmen masyarakat (dikutip dalam "Kejujuran dalam Balutan Drama Keluarga", 2014, para.7-8).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Irawanto, dimana film dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan apa yang dimuat dalam isi film tersebut. Film adalah sebuah karya yang merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sekitarnya (Irawanto, 1999, h.13, dikutip dalam Sobur, 2013, h.127).

Film *Sebelum Pagi Terulang Kembali* adalah buah karya sutradara Lasja F. Susatyo, yang digarap oleh KPK dan ditayangkan pada tahun 2014. Film yang bertemakan drama kekeluargaan ini memperlihatkan sebuah gambaran tentang bagaimana korupsi tidak hanya dapat berdampak besar bagi kehidupan pelakunya, tapi juga keluarga sekitarnya. Film ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak negatif daripada korupsi dan bagaimana peran keluarga dalam menghadapinya.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana film *Sebelum Pagi Terulang Kembali* merepresentasikan tindak pidana korupsi melalui tanda-tandanya. Penulis memilih film *Sebelum Pagi Terulang Kembali* terlebih untuk mengetahui bagaimana KPK beserta TII memperlihatkan bagaimana tindak korupsi digambarkan dalam film yang dibalut oleh drama kekeluargaan ini. Secara epistimologis, tanda dalam bahasa Yunani adalah semeion atau semiotika (Wibowo, 2011, h.5). Sedangkan film merupakan bidang kajian yang amat

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016

relevan bagi analisis struktural atau semiotika (Sobur, 2013, h.128). Salah satu tokoh Semiotika, Roland Barthes juga memberikan pernyataan bahwa semiotika dapat digunakan untuk membongkar struktur makna tersembunyi dalam sebuah media, terutama film (Danesi, 2004, h.9-10). Oleh karenanya, semiotika model Barthes dapat digunakan sebagai alat untuk meneliti film *Sebelum Pagi Terulang Kembali*, sehingga Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Representasi Korupsi dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali".

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana representasi korupsi dalam film *Sebelum Pagi Terulang Kembali* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui representasi korupsi dalam film *Sebelum Pagi Terulang Kembali.*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi penelitian yang menganalisis teks media, terutama film, dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Dengan itu diharapkan penelitian ini mampu

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016

memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep representasi yang diaplikasikan dalam semiotika film, terlebih film yang mengandung tema korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa film dapat dikaji dengan berbagai ilmu, salah satunya adalah ilmu semiotika. Selain itu Penulis juga berharap kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengetahui tentang penggambaran korupsi yang ditunjukkan oleh film *Sebelum Pagi Terulang Kembali.*

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Representasi korupsi..., Cosmas Bayu Agung Sadewo, FIKOM UMN, 2016